



PAMERAN LUKISAN CINTA PUSPA DAN SATWA

Pengunjung mengamati lukisan pada pameran bertema Cinta Puspa dan Satwa di Galeri Dekranasda Kantor Pemkot Bekasi, Jabar, Senin (20/11). Pameran yang diselenggarakan Rumah Seni dan Budaya Pandawa Bekasi tersebut memamerkan 36 lukisan karya dari 36 perupa se-Jabodetabek dan luar daerah, berlangsung hingga 26 November.

## Coldplay Hibahkan Kapal Penyedot Sampah ke Pemkab Tangerang

Dipilihnya daerah Kabupaten Tangerang sebagai penerima hibah kapal sampah dari band asal negara Inggris itu karena menjadi wilayah strategis dalam mengurangi sampah khususnya sampah jenis plastik yang masuk ke laut.

**TANGERANG (IM)**- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Provinsi Banten akan menerima bantuan atau hibah satu unit kapal jenis interceptor sebagai penyedot sampah senilai Rp12 miliar dari grup band Coldplay melalui organisasi nirlaba bernama The Ocean Cleanup.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten

Tangerang, Fachrul Rozi mengatakan bahwa pemberian unit kapal yang bernama Neon Moon II tersebut dimaksudkan untuk membantu mengatasi masalah sampah di titik muara Sungai Cisadane, Tangerang.

"Sekarang masih proses, dan memang ini (kapal penyedot sampah) bantuan dari donatur Band Coldplay melalui organisasi nirlaba TOC. Sekarang untuk kapal

itu masih berada di Bahari, Tanjung Priok, Jakarta untuk menunggu ke dokumennya yang masih di proses penyelesaian," kata Fachrul, Senin (20/11).

Menurut dia dipilihnya daerah Kabupaten Tangerang sebagai penerima hibah kapal sampah dari band asal negara Inggris itu karena menjadi wilayah strategis dalam mengurangi sampah khususnya sampah jenis plastik yang masuk ke laut.

"Menurut mereka, karena Sungai Cisadane ini menghasilkan sampah plastik. Dan mereka juga sudah melakukan observasi/penelitian, makanya yang menentukan lokasi di muara Sungai Cisadane itu ya mereka," terangnya.

Ia mengatakan kapal jenis interceptor dari generasi ke

tiga yang dibekali dengan teknologi paling terbaru ini dapat berkontribusi menanggulangi sekitar 1.000 ton sampah plastik yang dibuang ke laut setiap tahunnya.

Dia menambahkan, kapal ini nantinya bakal diserahkan secara resmi ke Pemkab Tangerang pada tanggal 25 November 2023 mendatang dengan titik lokasi penempatan di wilayah Tanjung Burung, Teluknaga.

"Rencana nanti tanggal 25 November ini akan dikirim dari Jakarta ke Tanjung Burung, Teluknaga untuk diserahkan kepada kami. Kemudian, launching-nya kita bakal kita lakukan pada tahun depan di bulan Januari 2024," ungkapnya.

Kendati demikian, untuk mempersiapkan pengoperasian kapal penanganan sam-

pah itu, pihaknya pun kini sudah disiapkan sumber daya manusia (SDM) sebanyak 12 orang yang ditugaskan sebagai operator sampai pengelolaan di bank sampahnya.

"Sudah kita siapkan mulai dari operator, ekskavator, pengamanan dan pengelolaan bank sampahnya. Sebelum itu mereka kita berikan pelatihan secara khusus," ujarnya.

Ia berharap, dengan adanya kapal penyedot sampah ini dapat membantu mengurangi permasalahan sampah di laut terutama di pesisir utara Tangerang yang kini menjadi muaranya Sungai Cisadane.

"Tentu kami berharap ini bisa mengurangi sampah-sampah plastik yang ada di daerah pantura yang memang sekarang volumenya cukup banyak," kata dia. ● pp

## Saluran Tersier Bangunan Pisangan Kanan Dibangun, Begini Respon Petani

**TANGERANG (IM)**- Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) saat ini tengah membangun saluran tersier Bangunan Pisangan (BPS) 5 Kanan Daerah Irigasi Cisadane Barat Laut.

Di mana pembangunan tersebut bertujuan memperlancar air hingga ke persawahan petani yang berada di hilir.

Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Kabupaten Tangerang, H. Sedet mengatakan, para petani yang berada di Desa Rawa Boni, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang sangat terbantu dengan dibangunnya saluran tersier ini.

Pasalnya, pembangunan ini menjadikan air mengalir secara lancar dari hulu ke hilir. Di mana, sawah petani yang ada di Desa Rawa Boni dan Desa Laksana, Kecamatan Pakuhaji bisa teraliri dengan baik.

"Kalaupun saat ini terdapat pengerjaan pembangunan saluran, namun sawah petani tidak kesulitan air," ungkapnya, Senin (20/11).

Menurutnya, pihak juru pengairan selalu menjaga debit air dan selalu mengontrol aliran air, meski pun terdapat pekerjaan pembangunan saluran

tersier.

"Pihak juru pengairan selalu membuka pintu air saat malam hari, karena pekerjaan pembangunan saluran tersebut sedang tidak ada aktivitas," ucapnya.

Selain itu kata H. Sedet, pihak petani yang ada di Desa Rawa Boni dan Desa Laksana saat ini tidak ada yang mengeluh kesulitan akan air pada sawahnya. Bahkan kata dia, terlihat sawah para petani yang ada di sini cukup hijau dan subur.

"Coba tuh pak lihat sawah para petani, dan mulai keluar padinya," ucapnya.

Sedet berharap, agar pembangunan saluran tersier ini bisa berjalan lancar, dan bisa bermanfaat bagi para petani.

"Karena kalau sudah diperbaiki seperti ini, insyaallah air akan mengalir lancar ke sawah-sawah petani yang ada di Rawa Boni dan sekitarnya.

Sementara itu, Penjaga Pintu Air (PPA) juga menambahkan,

pihaknya selalu mengontrol debit air yang mengalir pada saluran tersier yang ada di Desa Rawa Boni tersebut

"Saya membuka pintu air saat sore, malam hari hingga pagi hari. Sebab waktu itulah yang tepat jika ada pekerjaan pembangunan saluran seperti ini," katanya. ● pra

GEDUNG LAYANAN PERPUSTAKAAN UMUM PROVINSI SULBAR DIRESMIKAN

## Kepala Perpustakaan: Perpustakaan Hadir untuk Membentuk Karakter dan Jati Diri Bangsa



Kepala Perpustakaan, Muhammad Syarif Bando bersama Pejabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat, Prof Zudan Arif Fakrulloh, usai peresmian Gedung Layanan Perpustakaan Umum Provinsi Sulawesi Barat.

**MAMUJU, SULBAR (IM)**- Perpustakaan hadir untuk membentuk karakter dan jati diri bangsa. Kehadirannya sangat penting agar Indonesia dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Namun, untuk membawa Indonesia menjadi negara maju dibutuhkan waktu. Dan kuncinya ada pada seberapa kuatnya keinginan masyarakat dalam berliterasi, khususnya mencari ilmu di perpustakaan.

Menurut Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando, Indonesia tidak pernah merubah paradigma pendidikan, dari pemberantasan buta aksara sampai sekarang.

"Padahal sudah 78 tahun merdeka. Tapi fokusnya masih ke arah sana. Bandingkan dengan Jepang (saat berusia) 30 tahun, memiliki visi di dunia pendidikan dan industrialisasi. Ketika sudah 60 tahun (pasca perang dunia II), menjelma menjadi negara informasi. Kemudian negara-negara di Asia Timur lainnya seperti Tiongkok dan Korea. Ketika 40 tahun merdeka, menjelma sebagai negara produsen," beber Syarif dalam kegiatan peresmian gedung layanan perpustakaan umum Provinsi Sulawesi Barat dan Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) di Mamuju, Senin (20/11).

Ia menuturkan, perpustakaan bisa membawa masyarakat memiliki kedalaman pengetahuan yang

didigitalkan, dan ada file digital yang bisa diakses masyarakat. Perpustakaan juga harus datang ke desa dan membangun komunitas literasi di sana," imbuh Zudan.

Zudan mengibaratkan yang gemar membaca diibaratkan sumbu panjang. "Kalau sumbu pendek kan, begitu api dinyalakan bakal langsung meledak. Sumbu panjang berbeda. Begitu api nyala, perlu waktu untuk sampai ke sumber ledakan. Bakal diolah, dianalisa sebelum diputuskan. Makin banyak membaca, masyarakat bisa kelola informasi. Tidak ada orang pintar tanpa membaca. Perpustakaan punya peran luar biasa dalam mewujudkan tradisi sumbu panjang ini," tandasnya.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulbar, Muhammad Idris menyatakan, wilayahnya tertinggal dalam level literasi publik. Alasannya karena ketiadaan ekosistem yang menjadi penyebab

tersebut. "Sebagai contoh lembaga pendidikan. Seharusnya menjadi kunci munculnya atmosfer baru ekosistem literasi. Tapi belum berani mengambil peran serta tanggung jawab yang lebih jauh lagi dalam menggalakkan literasi di Sulbar," ungkapnya.

Idris berpendapat sulit mewujudkan hal itu hanya dengan ajakan-ajakan. Harus diperjuangkan oleh berbagai pihak. Kuncinya mendorong kebijakan literasi publik di tingkat struktural.

Pustakawan Ahli Utama Perpustakaan, Deni Kurniadi menambahkan, keberadaan gedung fasilitas Layanan perpustakaan umum tak terlepas dari dukungan dan peran serta pemerintah pusat. Kemudian sinergitas antara Perpustakaan dengan Komisi X DPR RI, membuat bangunan senilai Rp15 miliar itu bisa hadir.

"Perpustakaan bukan hanya menjadi tempat mencari informasi. Tapi juga sebagai tempat berkumpul, beraktivitas, berlatih keterampilan dan juga pusat kebudayaan," ucapnya.

Ketua DPRD Provinsi Sulbar, St. Suraidah Suhardi menyampaikan, jika pihaknya sedang membahas kebijakan anggaran dan mengharapkan masukan OPD terkait untuk kebutuhan apa saja yang diperlukan. ● bam

## Tolak Rumus UMP Pakai PP 51, Buruh Ancam Mogok Kerja

**SERANG (IM)**- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berencana akan mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2024. Namun, belum juga diumumkan, terdapat suara penolakan dari Serikat Buruh terhadap UMP itu.

Ketua DPD SPN Provinsi Banten, Intan Indria Dewi mengatakan, pihaknya menolak penetapan UMP 2024 jika dalam penetapannya masih menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) 51 tahun 2023. Menurutnya, jika merujuk dengan PP itu maka kenaikan UMP hanya naik beberapa persen saja, tidak sama dengan tuntutan pihaknya yang ingin UMP Banten naik jadi 15 persen.

"Yang pasti kita tak ingin penetapan UMP ini menggunakan PP 51, kita akan keluar dari PP 51 karena kalau kita menggunakan PP itu sudah tidak sesuai untuk mencukupi kebutuhan hidup ataupun tidak mencapai upah riil nya," ucapnya saat dihubungi Radar Banten melalui telepon seluler, Senin (20/11).

Dalam pasal 26 aturan PP Nomor 51 Tahun 2023, formula perhitungan Upah Minimum mencakup 3 varia-

bel yaitu Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Tertentu (disimbolkan dalam bentuk  $\alpha$ ). Indeks tertentu berada dalam rentang nilai 0,10 sampai dengan 0,30. "Koefisien alpha itu akhirnya hanya dinilai 0,1 sampai dengan 0,3 persen. Yang mana kontribusi buruh terhadap pertumbuhan ekonomi hanya dinilai 10 sampai 30 persen saja," jelasnya.

Pihaknya pun mengancam akan melakukan aksi mogok kerja dan bahkan melakukan demo besar-besaran di Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang. "Mogok massal dilakukan di setiap perusahaan yang ada di Provinsi. Kalau SPN sendiri untuk anggota ada sekitar 100.000 di Provinsi Banten. Namun besok kita berencana hanya melakukan pengawalan pengambilan SK UMP saja," ungkapnya.

Sementara aksi demonstrasi akan dilakukan saat Pemerintah menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yakni pada tanggal 25 November 2023. "Untuk UMK kita akan mengerahkan kekuatan penuh yang akan dilakukan di KP3B," pungkasnya. ● pra

## 8 Tahun Numpang, Dindikbud Banten Bangun Gedung SMKN 6 Tangsel

**TANGSEL (IM)**- Selama 8 tahun numpang di bangunan SD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten membangun gedung untuk SMKN 6 Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Budi Prajogo berterima kasih kepada Pemprov Banten yang telah membangun gedung bagi SMKN 6 Kota Tangsel. "Terima kasih Pemprov Banten telah membangun gedung yang telah menanggung beban selama 8 tahun numpang. Beberapa kali reses selalu menjadi pertanyaan bagaimana SMKN 6 yang masih numpang ke fasilitas SD," ujar Budi.

Dengan adanya pembangunan ini, politikus PKS ini mengaku masyarakat memiliki sekolah yang nyaman dan semoga ini akan dapat berkontribusi dalam peningkatan SDM.

Sementara itu, Pj Gubernur Banten, Al Muktabar mengatakan, SMKN 6 Tangsel sudah delapan tahun berdiri dan sekarang Pemprov Banten fasilitasi untuk memiliki tempat ruang belajar sendiri yang representatif.

"Selama ini kita numpang di sekolah dasar mudah-mudahan (lebih nyaman-red). Saya tanya jurusan apa saja yang dibuka, kita tidak ingin SMK berkontribusi kepada pengangguran maka penyesuaian jurusan itu sangat penting," tandasnya.

Jurusan di SMKN 6 Tangsel yakni perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, serta broadcasting. "Saya menitipkan ke beliau (kepala sekolah-red) agar juga ke depan memikirkan tentang satu jurusan yang sangat trend saat ini tentang coding, kemampuan orang dalam rangka kita digitalisasi," ujar Al.

Kata dia, tahun ajaran ini, ada 350 orang pendaftar. Namun yang diterima hanya 200 siswa. Ia berharap ke depan semua pendaftar diterima agar semua anak dapat bersekolah.

Terkait sekolah di Banten yang masih filial, Al mengaku akan mengecek kembali. "Nanti kita cek lagi yang harus difasilitasi akan terus secara bertahap kita tingkatkan kapasitasnya, disamping juga tadi menyesuaikan kebutuhan dari pasar atau masyarakat," terangnya. ● pp



FASHION SHOW KARAWO FESTIVAL MALEO

Peserta mengenakan busana kreasi pada Fashion Show Karawo di objek wisata Danau Perintis, Kab. Bone Bolango, Gorontalo, Senin (20/11). Peragaan busana berbahan dasar sulaman karawo (khas Gotontalo) ini diikuti 22 kontingen.

## Serikat Pekerja Sebut Ada Disparitas Upah di Banten Selatan

**SERANG (IM)**- Serikat Pekerja Nasional (SPN) menyebut bahwa selain disparitas pembangunan, ada juga disparitas upah yang membedakan wilayah Banten Selatan dengan Banten Utara.

Ketua DPD SPN Provinsi Banten, Intan Indria Dewi mengatakan, disparitas itu sangat terlihat jelas antara Banten Selatan yang meliputi Kabupaten Lebak dan Pandeglang, dengan Banten Utara seperti wilayah Tangerang Raya dan Gilegon. "Bahkan kalau terkait upah minimum provinsi (UMP) itu kita melihat adanya disparitas upah di Kabupaten Pandeglang dan juga Lebak. Makanya penetapan UMP harus sesuai dengan apa yang kita sarankan," ucapnya saat dihubungi, Senin (20/11).

Intan mengatakan, Kabupaten Lebak maupun Pandeglang upah minimum masih di bawah Rp3 juta. Sementara di wilayah Banten Utara sudah di atas Rp4 juta. Padahal, kebutuhan ekonomi di dua daerah itu kini tidak jauh berbeda.

"Kalau kita bicara jaringan pengaman apalagi disparitas

upah Lebak dan Pandeglang itu sangat jauh sekali, kasihan. Sedangkan kebutuhan hidup atau harga barang pokok yang ada di Lebak dan Pandeglang itu hampir sama saja dengan di Serang, tetapi nilai upah mereka di bawah Kabupaten Serang dan Kota Serang dan daerah lainnya di Banten," ungkapnya.

Intan menyebut, dengan adanya disparitas upah itu kini banyak buruh di Banten Selatan yang kondisinya jauh dari sejahtera. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang kesulitan memenuhi jaring pengaman sosial setiap harinya.

Untuk itu, dirinya meminta kepada Pemprov Banten untuk lebih memerhatikan ketetapan upah di wilayah Banten Selatan dengan tidak merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. "Agar mengurangi disparitas upah dan kawan-kawan juga bisa memenuhi konsumsi itu anaknya kita mengusulkan agar tak menggunakan PP 51 itu, tetapi melihat pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi serta juga kebutuhan hidup layak," pungkasnya. ● pra